

Judul : Menhut disempot DPR
Tanggal : Jumat, 05 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1 dan 6

Menhut Disempot DPR



TIDY KROU/NRKYAT MERDEKA/RI 12

MEMBERI SALAM: Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni disempot DPR terkait kerusakan hutan yang menyebabkan banjir bandang dan longsor di Sumatera dan Aceh. Para wakil rakyat sempat meminta Raja Juli mundur dari jabatannya.

Kamis (4/12/2025), Menhut mengikuti rapat dengan Komisi IV DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dimulai pukul 14.30 WIB, dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati atau Titiek Soeharto.

Dalam rapat tersebut, para politisi Senayan bersuara keras, meluapkan kekecewaan karena hutan di Sumatera dan Aceh gundul sehingga mengakibatkan bencana.

♦ BERSAMBUNG KE HAL 6

Didesak Mundur, Raja Juli Siap Dievaluasi

Menhut Disemprot DPR

... DARI HALAMAN 1

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin sampai meminta Menhut Raja Juli untuk mundur dari jabatannya. Dia menilai, Raja Juli gagal menjalankan tugas, tidak konsisten dalam kebijakan, dan menerbitkan sejumlah izin yang dinilai bermasalah, serta bertentangan dengan rekomendasi daerah.

"Kalau Pak Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, lebih baik mundur. Ini bukan soal pribadi, tapi soal masa depan hutan kita. Pak Menteri terlihat tidak memahami persoalan kehutanan secara utuh," ujar Usman.

Dia menegaskan, penyelesaian persoalan kehutanan tidak dapat dilakukan melalui retorika atau dengan menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, kerusakan hutan yang terjadi saat ini merupakan tanggung jawab penuh pejabat yang sedang menjabat.

"Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon dengan diameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab Menteri saat ini.

Jangan lempar ke pemerintah terdahulu," kata Usman.

Dalam rapat tersebut, Usman juga menyoroti pernyataan Raja Juli yang mengutip ayat dan hadis, tapi tidak selaras dengan kebijakan yang diambil. Ia mencontohkan inkonsistensi yang terjadi pada penerbitan izin di wilayah Tapanuli Selatan.

Usman menyebut Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasiribu telah merekomendasikan penutupan dan pengawasan izin tertentu, tapi pada 30 November 2025 kementerian tetap menerbitkan izin baru. "Pernyataan Pak Menteri tidak sejalan dengan keputusan yang dibuat," ujarnya.

Usman juga meminta Raja Juli memberi perhatian serius terhadap kerusakan hutan di tiga provinsi yang disebutkan mengalami degradasi parah. Ia menuntut penjelasan terkait rencana reboisasi, waktu pemulihan kawasan, serta langkah konkret pemulihan hutan gundul.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR dari PKS, Rahmat Saleh, mengingatkan Raja Juli bahwa mengundurkan diri bukanlah hal yang salah. Menurutnya, itu justru perbuatan mulia. Dia pun mencontohkan dua menteri di Filipina yang mundur lantaran tak becus

menangani banjir.

"Gentleman, dua menteri mengundurkan diri karena merasa tidak mampu mengatasi itu. Jadi bukan sesuatu yang salah juga kalau menteri tidak sanggup mengatasi ini, mundur juga," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati atau Titiek Soeharto juga memperlihatkan video viral truk besar yang mengangkut kayu gelondongan dari Sibolga melintas di Parapat, Sumatera Utara, Sabtu (28/11/2025).

"Terus terang saya sedih, miris, dan marah. Bayangkan, kayu sebesar itu, 1,5 meter. Berapa ratus tahun yang dibutuhkan pohon sebesar itu untuk tumbuh? Manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya bisa motong-motong kayu seperti itu?" ungkap Titiek.

Yang lebih menjengkelkan lagi, kata dia, truk itu melintas tanpa dosa dua hari setelah musibah banjir bandang dan tanah longsor melanda tiga provinsi di utara Sumatera. Seolah menghina bangsa yang sedang berduka.

"Sungguh menyakitkan. Ini sesuatu, kalau orang Jawa bilang ngece (mengejek), baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indo-

nesia," ucap Titiek.

Dia pun meminta Menhut untuk segera mencari tahu siapa di balik perusahaan kayu gelondongan itu. Dia juga menyoroti banyaknya temuan pohon yang hanyut terbawa banjir Sumatera hingga memenuhi pantai dan sungai.

Agar kejadian serupa tak terulang, Titiek meminta syarat pembukaan lahan baru diperketat. Misalnya mengkaji dengan teliti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari setiap program pembukaan lahan. "Tolong, jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebang. Sudah cukup lah ini," pesannya.

Menanggapi kritikan DPR, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan siap dievaluasi terkait kinerja sebagai pembantu presiden. "Saya yakin ya, namanya kekuasaan itu milik Allah. Itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi," kata Raja Juli.

Raja Juli juga mengaku tak pernah menghapus kritik netizen yang mampir di media sosialnya sebagai bagian dari sikap keterbukaan terhadap kritik.

"Jadi monggo, tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya, itu adalah hak prerogatif Pak Presiden," papar Raja Juli. ■ MEN